

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalah yang penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah dikehendaki untuk berkreasi mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan (Ariana & Putri, 2016).

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk tingkat kemandirian keuangan daerah (Erstelita & Darwis, 2015). Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan mereka sendiri sehingga mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Halim & Kusufi (2012, hlm. L-5) Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Kemandirian keuangan daerah dapat di pengaruhi oleh belanja modal. Menurut Ariana & Putri (2016) semakin tinggi belanja modal dapat meningkatkan kualitas publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah sehingga daerah tersebut dikatakan mandiri. Selain belanja modal yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah

juga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tingginya pajak daerah maka dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Menurut Novalistia (2016) semakin tingginya pajak daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Selain itu dana alokasi umum memiliki pengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum yang mengalami penurunan maka dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Menurut Tahar & Zakhiya (2011) apabila dana alokasi umum suatu daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah akan semakin tinggi.

Kemandirian keuangan daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mampu mendanai daerah mereka sendiri tanpa ketergantungan dengan bantuan pemerintah pusat. Menurut Ariani & Putri (2016) kenyataannya menunjukkan pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur kegiatan dan pembangunan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai kegiatan dan pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyatakan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dianggarkan berkisar antara 13,11 % sampai 20,08 % pada tahun 2011 sampai 2015 sementara kontribusi dana perimbangan berkisar antara 49,09 % sampai 58,11 %, sisanya persentase pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain yang sah. Dengan kata lain, peranan pendapatan asli daerah hampir diseluruh kabupaten/Kota Jawa Barat relatif kecil yang mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat. Ini berarti kebutuhan pembiayaan pengeluaran Kabupaten/Kota Jawa Barat pada tahun 2011 sampai 2015 sebagian besar didanai oleh transfer uang dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2013 – 2015 terdapat beberapa fenomena antara

belanja modal, pajak daerah dan dana alokasi umum dengan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan atas Fenomena Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten /Kota Jawa Barat	Tahun	Belanja Modal	Pajak Daerah	Dana Alokasi Umum	Kemandirian Keuangan Daerah
Kab.Bandung	2013	13.85 %	8.54 %	51.36 %	18.61 %
	2014	12.38 %	7.39 %	46.98 %	22.69 %
	2015	16.74 %	7.59 %	43.72 %	21.24 %
Kota Bogor	2013	15.78 %	21.68 %	43.60 %	42.93 %
	2014	29.32 %	21.41 %	41.66 %	45.84 %
	2015	23.66 %	20.82 %	38.56 %	51.51 %
Kab.Bekasi	2013	33.74 %	25.01 %	32.21 %	55.86 %
	2014	31.06 %	28.36 %	30.47 %	66.67 %
	2015	29.59 %	30.47 %	27.77 %	68.84 %

Sumber: Diolah dari LKPD tahun 2013-2015

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2013-2015 mengalami fluktuatif dan memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih rendah dari Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung memasuki kategori rendah sekali dalam skala 0 % - 25 %. Berbeda dengan kemandirian keuangan daerah Kota Bogor pada tahun 2013-2015 yang mengalami peningkatan dan lebih tinggi kemandirian keuangan daerahnya jika dibandingkan dengan Kota Bogor namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi. Kota Bogor pada tahun 2013 dan 2014 kemandirian keuangan daerahnya masuk ke skala 25 % - 50 % dikategorikan rendah dan tahun 2015 masuk ke skala 50 % -75 % dikategorikan sedang. Kabupaten Bekasi kemandirian keuangan mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari Kabupaten Bandung dan Kota Bogor. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bekasi pada tahun 2013-2015 masuk ke skala 50 % - 75 % yang dikategorikan sedang. Kemandirian keuangan daerah ini diperoleh dari hasil pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan transfer.

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada tahun 2013-2015 belanja modal Kabupaten Bandung mengalami sebuah peningkatan tetapi paling rendah belanja modalnya jika dibandingkan dengan Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi. Belanja modal Kabupaten Bandung yang mengalami peningkatan jika dihubungkan dengan

kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan yang terjadi pada akhir tahun terdapat suatu fakta yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Berbeda dengan Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi pada tahun 2013-2015 yang belanja modal mengalami sebuah penurunan tetapi belanja modal lebih tinggi dari Kabupaten Bekasi. Jika belanja modalnya yang mengalami penurunan dihubungkan dengan kemandirian keuangan daerah yang mengalami sebuah peningkatan terdapat perbedaan antara suatu fakta dengan teori. Menurut Ariana & Putri (2016) belanja modal meningkat maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Tingkat belanja modal pada tabel tersebut diperoleh dari hasil belanja modal dibagi dengan hasil belanja daerah. Dari ketiga daerah Kabupaten Bandung, Kota Bogor dan Kabupaten Bandung pada tahun 2013-2015 terdapat sebuah fenomena antara belanja modal dengan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, pajak daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2013-2015 memiliki tingkat yang paling rendah diantara Kota Bogor dan Kabupaten Bandung. pajak daerah Kabupaten Bandung walaupun memiliki tingkat yang paling rendah tapi mengalami peningkatan pada akhir tahun. Kabupaten Bandung yang pajak daerahnya mengalami peningkatan jika dihubungkan dengan menurunnya kemandirian keuangan daerah terdapat fakta yang tidak sesuai dengan teori. Berbeda dengan pajak daerah Kota Bogor yang mengalami sebuah penurunan walaupun tingkat persentasenya lebih besar dari Kabupaten Bandung. Pajak daerah Kota Bogor yang mengalami penurunan dengan kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan ini tidak sesuai dengan teori. Menurut Novalistia (2016), semakin tingginya pajak daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Tetapi untuk Kabupaten Bandung yang memiliki pajak daerah lebih tinggi dari Kabupaten Bandung dan Kota Bogor sesuai dengan teori yang ada sebab pajak daerahnya yang meningkat diikuti pula dengan kemandirian keuangan daerah yang meningkat. Dari tiga daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi fenomena pajak daerah dengan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Bandung dan Kota Bogor tahun 2013 – 2015.

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, pada tahun 2013 – 2015 Kabupaten Bandung memiliki dana alokasi umum yang lebih tinggi dari Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi. Dana alokasi umum Kabupaten Bandung yang mengalami penurunan dengan kemandirian keuangan daerahnya juga ikut mengalami penurunan ini terjadi sesuatu fakta yang tidak sesuai dengan teori. Menurut Tahar & Zakhiya (2011) apabila dana alokasi umum suatu daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah akan semakin tinggi. Berbeda dengan Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi pada tahun 2013-2015 yang dana alokasi umum mengalami penurunan yang diikuti oleh kemandirian keuangan daerah yang meningkat ini sesuai dengan teori yang ada. Bahwa dari ketiga daerah tersebut terjadi sebuah fenomena dana alokasi umum dengan kemandirian keuangan daerah hanya terjadi pada Kabupaten Bandung.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya belanja modal, pajak daerah dan dana alokasi umum pemerintah daerah dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah. Pada fenomena tersebut terdapat perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang tidak konsisten. Selain itu berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai kemandirian keuangan daerah yang hasilnya masih terdapat perbedaan dengan peneliti lainnya.

Hasil penelitian Ariana & Putri (2016) mengenai belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah menyatakan bahwa belanja modal signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian Erstelita & Darwis (2015) menyatakan bahwa belanja modal signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian Sari (2015) menyatakan belanja modal tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian kembali.

Beberapa penelitian telah menjelaskan mengenai hubungan pajak daerah dengan kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian Darmayasa dan Bagiada (2013), Nggilu,dkk (2016), dan Novalistia (2016) menyatakan bahwa pajak daerah signifikan positif dengan kemandirian keuangan daerah. Namun berbeda

dengan hasil penelitian Kadafi & Putra (2013) dan Wong (2004) yang menyatakan pajak daerah tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini terjadi ketidak konsistenan pada hasil penelitian terdahulu lainnya yang tidak sejalan.

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kemandirian keuangan daerah juga diteliti oleh para penelitian. Penelitian Sari (2015) menyatakan dana alokasi umum signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Naganathan & Sivagnanam (2000), Tahar & Zakhiya (2011), Ariana & Putri (2016) menyatakan bahwa dana alokasi umum signifikan negatif dengan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian Marizka (2013) menyatakan dana alokasi umum tidak signifikan dengan kemandirian keuangan daerah. Hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ariana & Putri (2016) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel, periode dan metode penelitiannya serta beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Ariana & Putri (2016) meneliti tentang Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah yang menggunakan sampel seluruh 35 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2012-2014. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel belanja modal, pajak daerah, dan dana alokasi umum dengan menggunakan sampel Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Barat pada tahun 2011 sampai 2015 dengan menerapkan metode regresi linier berganda.

Berdasarkan dari latar belakang, perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan berbagai permasalahan yang terkait kemandirian keuangan daerah yang mana telah disampaikan di atas, maka dilakukan penelitian kembali mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah. Maka dilakukanlah penelitian yang berjudul Pengaruh Belanja Modal, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
- b. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
- c. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- c. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, serta diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu yang pengukurannya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Belanja Modal, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh Belanja Modal, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, yang pengukurannya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi pemerintah dan laporan realisasi berdasarkan anggaran dalam APBD.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran kepada pemerintah daerah akan pentingnya Kemandirian Keuangan Daerah. Dapat memberikan masukan dan informasi terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah di lingkup pemerintah daerah serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah guna meningkatkan kemajuan daerah. Manfaat praktis lainnya dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian ini kepada pihak yang membutuhkannya.

